

**ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Pratiwi
130710034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh
Pratiwi
130710034

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1 Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2 Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
- 3 Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 17 Februari 2017

Yang membuat pernyataan



Pratiwi

NPM 130710034

**ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

Oleh:

**PRATIWI
130710034**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 17 Februari 2017



**Padrisan Jamba S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pada hakikatnya pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Pada praktiknya kegiatan pembuktian hanyalah diartikan sebagai kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan penyelidikan dalam mencari bukti maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas pokok dalam proses penyidikan. Dalam tindak pidana pembunuhan terdapat metode pemeriksaan yakni dengan menggunakan teknik rekonstruksi guna dapat lebih menerangkan kejadian yang sesungguhnya. Teknik Rekonstruksi sendiri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: pertama, bagaimanakah pengaturan hukum positif terhadap pelaksanaan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan dan kedua, apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, serta penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan menitik beratkan aturan Hukum yang digunakan yang tidak bersinergi satu dengan yang lainnya. Didalam peraturan pelaksanaan rekonstruksi oleh pihak kepolisian sangat bertentangan dengan ketentuan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses rekonstruksi tidak wajib dilaksanakan pada kasus pembunuhan, namun apabila dianggap perlu pihak kepolisian tetap melaksanakan proses rekonstruksi tersebut, sehingga kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan rekonstruksi antara lain, dari pihak keluarga korban yang bisa saja mengacaukan kegiatan rekonstruksi yang sedang dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum, selain dari pada itu faktor peraturan perundang-undangan juga sangat mempengaruhi, dikarenakan pengaturan pelaksanaan rekonstruksi belum diatur oleh undang-undang, melainkan oleh surat keputusan kapolri.

Kata Kunci: Pembuktian, Rekonstruksi, Tindak Pidana.

ABSTRACT

In essence the more dominant evidence at trial in order to find the material truth of the events that occurred and provide assurance to the judge about the incident so the judge can make a decision fairly as possible. In practice the activities of proof is simply interpreted as evidence in the trial activities, and excluding activities of investigation in the search for evidence and gathering evidence or evidence which became the main task in the process of investigation. In the crime of murder are the examination methods using reconstruction techniques to be able to better explain the real events. Reconstruction Technique itself is set in the Decree of the Chief of Police Number. Pol.Skep/1205/IX/2000 on the Revision of the Guidelines and Technical Guidance Association of Crime Investigation Process. Studies conducted in this study include: first, how the setting of positive law on the implementation of the reconstruction of the criminal offense of murder and second, whether the obstacles faced by the police in the reconstruction of the perpetrators of the crime of murder, and this study using the method of Legal Research Empirical with Legal rules emphasize is used that does not synergize with each other. In the regulations implementing the reconstruction by the police is contrary to the provisions of the presumption of innocence or presumption of innocence, so that it can be said that the implementation of reconstruction work must be carried out in the murder case, but if it is considered necessary by the police continue to implement the reconstruction process, so that the obstacles encountered at the time of reconstruction, among other things, of the families of the victims that could disrupt reconstruction efforts being carried out by law enforcement officials, in addition to the factors legislation also greatly affected, because the setting of the reconstruction has not been regulated by law, but by decree Police chief.

Keywords: Evidence, Reconstruction, Criminal act.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala berkat dan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfni Husda S.Kom., MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, sekaligus Ketua Penguji dan Agus Riyanto, S.H., M.Kn sebagai Anggota Penguji.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.

6. Bapak AIPTU Sonny Hery Santoso, S.H., M.H., selaku Kasubnit Polresta Barelang.
7. (Almarhum) Papa dan Mama Tercinta, yang sangat banyak memberikan bantuan, arahan, nasehat, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Kakak Ratih, Abang Yogi, dan terutama buat Kakak Hotmaulina Malau yang selalu ada disaat suka dan duka.
9. Teman-teman semua yang telah berbagi ilmu pada masa pembelajaran.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas ini.

Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan segala anugrah dan berkat-Nya kepada kita, amin.

Batam, 17 Februari 2017

Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis	10
2.1.2 Rekonstruksi	11
2.1.3 Tindak Pidana	17
2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan	31
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Pemikiran	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Sumber Data	41
3.3 Alat Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	47
3.5 Metode Analisis Data	51
3.6 Lokasi Penelitian	53
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Polresta Barelang Kota Batam	54
4.1.2 Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	59
4.1.3 Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam	

	Melaksanakan Rekonstruksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	61
4.2	Pembahasan	64
4.2.1	Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	64
4.2.2	Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Melaksanakan Rekonstruksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	85
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan	105
5.2	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		
SURAT KETERANGAN PENELITIAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	39
-------------------------------------	----

Motto

Tuhan Allah adalah matahari dan perisai;

Kasih dan kemuliaan Ia berikan;

Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup
tidak bercela.

(Mazmur 84 : 12)

Bersukacitalah dalam pengharapan,

sabarlah dalam kesesakan, dan

bertekunlah dalam doa!

(Roma 12:12)